SIRD: #107
SOCIAL INVESTMENT ROUNDTABLE DISCUSSION

Social Investment Indonesia

HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE (HRDD) RANTAI PASOK

Memastikan Penghormatan HAM, Akuntabilitas Bisnis, dan Keberlanjutan Sepanjang Rantai Pasok.



Unang Mulkhan, MBA., PhD.
Pakar & Praktisi HRDD
in Supply Chain



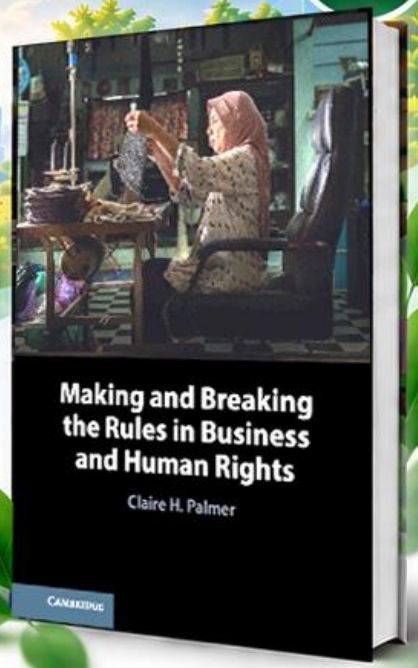
Ummu Azizah Mukarnawati
Co-Founder & Program Director
PT Gagas Inspirasi Nusantara



Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia



Host
Nur Astri M. S.
Associate
Social Investment Indonesia



socialinvestment.id

Jumat,
30 Oktober 2026

15.00 – 17.00
WIB

Online via:
zoom

Human Rights Due Diligence dalam Rantai Pasok



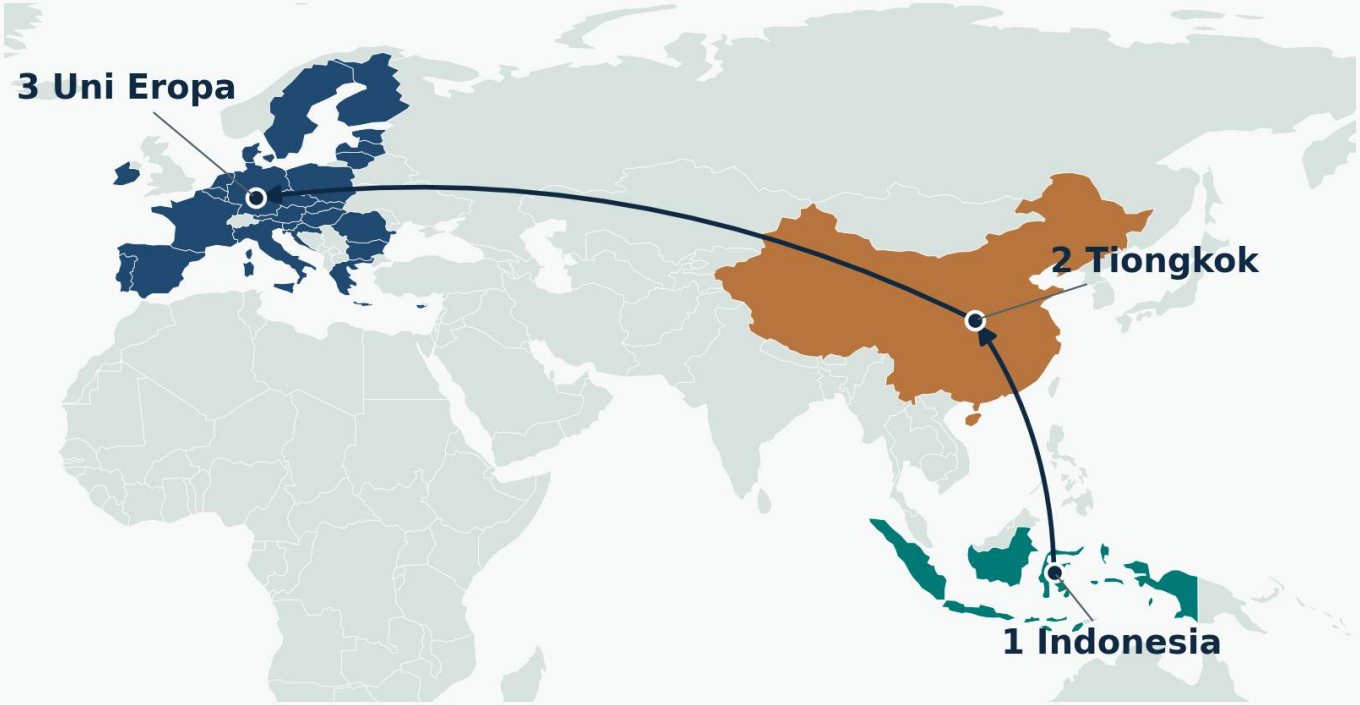
Unang Mulkhan, PhD

SIRD #107

Jumat, 30 Oktober 2026

Contoh: peta rantai pasok nikel global

Supply Chain Management (SCM) mengoordinasikan perencanaan, pengadaan, produksi, logistik, arus balik, serta informasi dan hubungan antar-mitra.



1 INDONESIA

Tambang laterit dan HPAL menghasilkan MHP

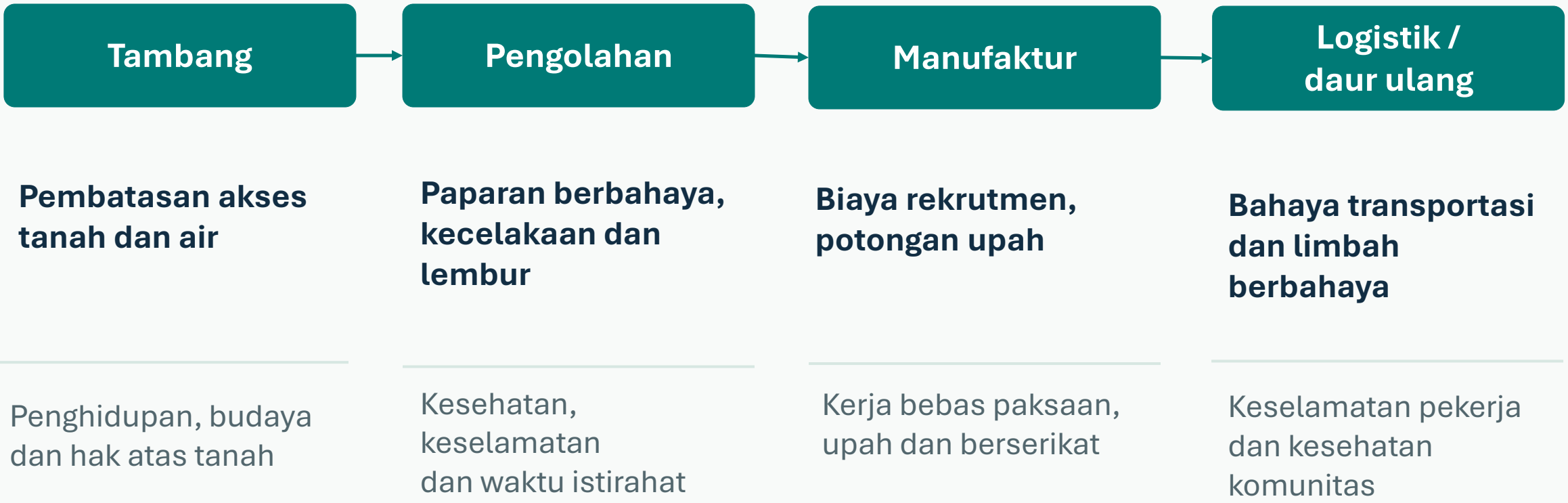
2 TIONGKOK

Nikel sulfat, bahan katoda dan sel baterai

3 UNI EROPA

Paket baterai, perakitan EV dan penggunaan kendaraan

Titik dampak HAM di sepanjang rantai pasok



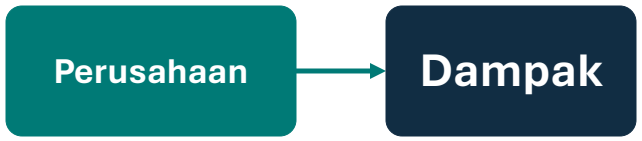
Pemangku hak: pekerja langsung dan kontraktor, keluarga, masyarakat adat dan komunitas sekitar

Potensi dampak perlu dibuktikan melalui asesmen. Rujukan: UNGP 17–18 dan OECD DD Guidance.

Keterlibatan perusahaan menentukan responsnya

Hubungan dengan dampak perlu dibuktikan sebelum menetapkan tindakan dan pemulihan

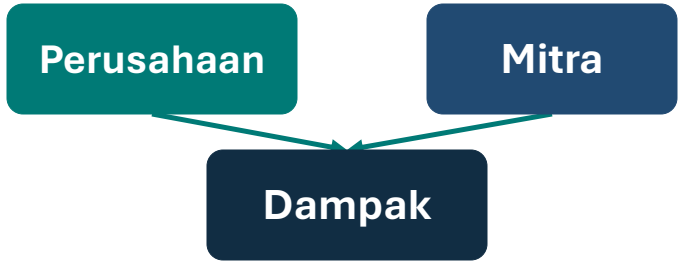
MENYEBABKAN



Contoh: upah pekerja sendiri sengaja tidak dibayarkan.

Hentikan dampak.
Sediakan atau bekerja sama dalam pemulihan.

BERKONTRIBUSI



Contoh: perubahan order ikut mendorong lembur berbahaya.

Hentikan kontribusi.
Gunakan pengaruh dan ikut memulihkan.

TERHUBUNG LANGSUNG



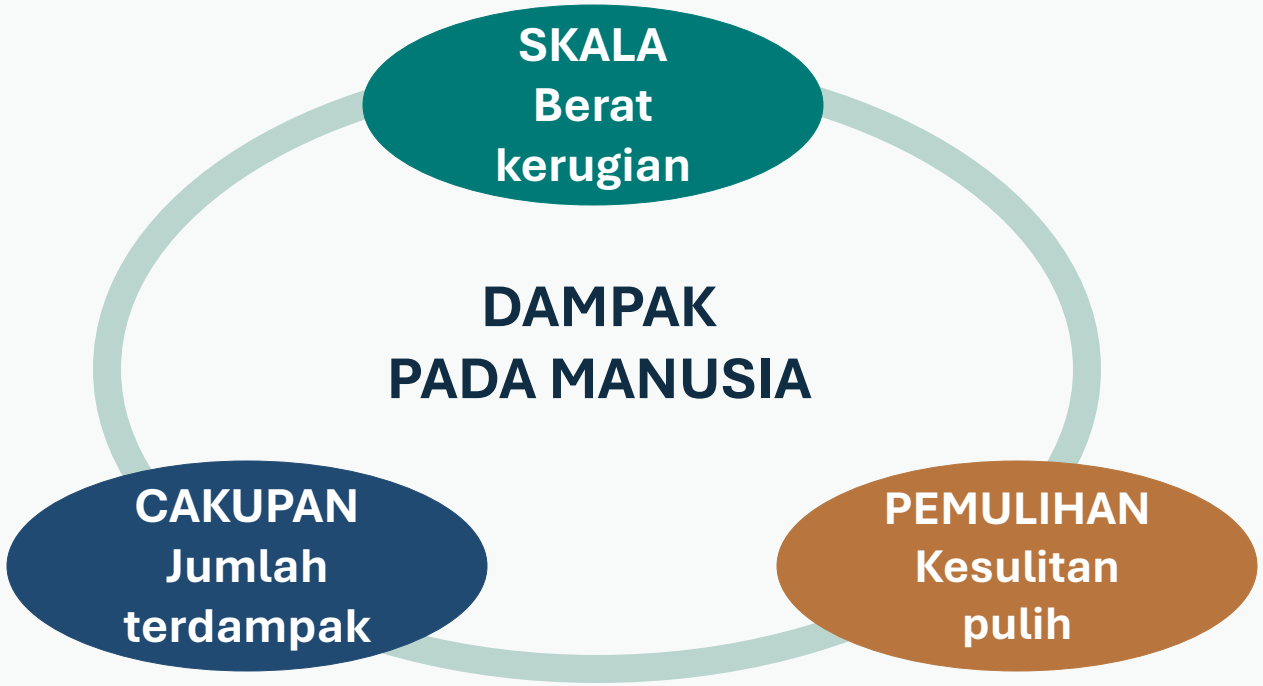
Contoh: dampak di pemasok, tanpa kontribusi pembeli.

Gunakan pengaruh.
Cegah dan mitigasi dampak.
Dukung pemulihan bila relevan.

UNGP 13, 19 dan 22. Keterlibatan dan pengaruh adalah dua penilaian yang berbeda.

Salient issues: prioritas dampak dan implikasi bisnis

Keparahan terhadap manusia menentukan prioritas. Risiko bisnis dinilai sebagai implikasinya.



Implikasi bagi perusahaan

01 Gangguan operasi dan penundaan

02 Biaya koreksi serta pemulihan

03 Sengketa dan penegakan hukum

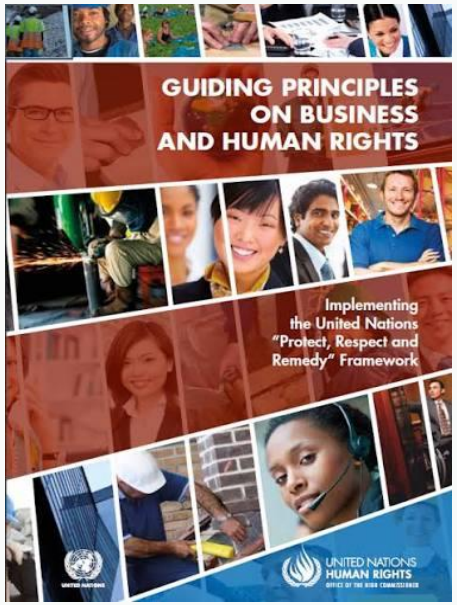
04 Tekanan pembeli dan hilangnya kepercayaan

Dampak sangat berat tetap memerlukan perhatian meski eksposur finansial belum terlihat.

Rujukan: UNGP 24 dan UNGP Reporting Framework.

Rujukan HRDD: tanggung jawab dan cara pelaksanaan

UNGPs dan OECD saling melengkapi. Standar sektoral memperdalam pemeriksaan sesuai risiko.

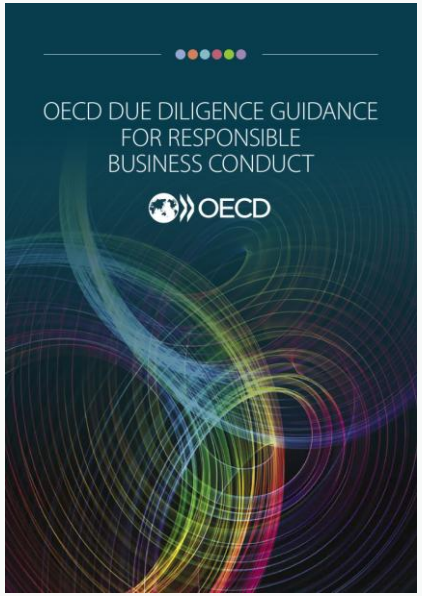


UNGPs

Tanggung jawab perusahaan

Prinsip 15–22
Kebijakan, HRDD dan pemulihan

Prinsip 24 dan 31
Prioritas dampak dan pengaduan



OECD

Langkah implementasi

Guidelines 2023
Ekspektasi responsible business conduct

DD Guidance 2018
Enam langkah berbasis risiko

HRDD: proses berkelanjutan untuk menangani dampak

Uji Tuntas HAM mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan mempertanggungjawabkan penanganan dampak, termasuk melalui hubungan rantai pasok.



Adaptasi OECD DD Guidance (2018), selaras dengan UNGPs. Pemulihan berjalan saat diperlukan.

Tuntutan internasional: apa bukti dan statusnya?

Status rujukan 30 Oktober 2026. Hukum, perjanjian dan agenda regional memiliki kekuatan berbeda.

UNI EROPA: CSDDD

Directive (EU) 2024/1760, diubah oleh 2026/470. Penerapan perusahaan dalam cakupan: 26 Juli 2029.

Hukum dengan batas cakupan tertentu

BILATERAL: EU–INDONESIA CEPA

Memuat hak pekerja dan responsible business conduct. Proposal penandatanganan diajukan pada 29 Juni 2026.

Berlaku setelah prosedur internal selesai

REGIONAL: ASEAN / AICHR

Workshop 13–14 Juli 2026 membahas HRDD untuk kerja paksa, perbudakan modern dan perlindungan pekerja migran.

Agenda kerja sama regional

Persyaratan pembeli, sertifikasi dan kebijakan nasional

B2B = hubungan bisnis antarperusahaan. Sumber tuntutan menentukan bukti yang perlu disiapkan.



PEMBELI GLOBAL / B2B

Kode industri RBA 8.0

Sistem uji tuntas, perlindungan pekerja dan pemantauan pemasok berikutnya.

Yang diuji: asesmen dan koreksi pemasok

SERTIFIKASI

RSPO P&C 2024, indikator 1.3.1

HRDD pada operasi dan pemasok langsung, disertai rencana tindakan.

Bukti risiko dan prioritas. Ketentuan transisi berlaku.

KEBIJAKAN INDONESIA

Perpres 60/2023 dan PRISMA

Stranas Bisnis dan HAM serta penilaian mandiri untuk pemetaan dan tindak lanjut.

Yang diuji: asesmen dan tindak lanjut

HRDD dalam keputusan pengadaan dan kontrak

SCM menghubungkan temuan HAM dengan pemilihan pemasok, syarat pembelian dan perbaikan



Peta fasilitas, subkontrak dan perekrut	**Suara pekerja, K3, upah dan komunitas**	**Harga, waktu kerja, akses dan tanggung jawab**	**Dukungan teknis, anggaran dan tenggat**	**Konfirmasi hasil oleh pemangku hak**
Pemeriksaan sesuai tingkat risiko	Prioritas pada dampak berat	Syarat pembelian yang mendukung hak	Tindakan dan pemulihan sesuai peran	Lanjut, eskalasi atau revisi respons

Output setiap tahap perlu dapat diuji. Prioritas HAM mengikuti dampak pada manusia, bukan nilai belanja.

Hasil HRDD: kondisi membaik dan hak dipulihkan

Keberhasilan perlu dikonfirmasi oleh pekerja dan masyarakat yang terdampak

1

PENCEGAHAN

Bahaya kerja dan biaya rekrutmen berkurang.

2

PENGADUAN

Akses aman dan perlindungan dari pembalasan.

3

PEMULIHAN

Hak yang hilang dipulihkan dan kasus tidak berulang.

Pertanyaan direksi: apa yang berubah, siapa bertanggung jawab, dan siapa mengonfirmasi hasilnya?

Q & A